

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)

TAHUN 2020



DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KOTA DEPOK

**GUDANG
ARSIP**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi.....	5
1.4 Isu-isu Strategis yang Dihadapi	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Rencana Strategi 2016- 2021.....	9
2.2 Perjanjian Kinerja 2018	17
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	22
3.2 Realisasi Anggaran	39
BAB IV. PENUTUP	47
4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja	47
4.2 Tantangan dan Kendala Dalam Pencapaian Kinerja	48
4.3 Strategi Pemecahan Masalah	49

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT , atas limpahan syukur rahmat dan karuniaNya, maka Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun 2020 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu cara perbaikan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

LAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok merupakan Komitmen nyata Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam mengimplementasikan Sistem Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang baik sebagaimana di amanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor 53 Tahun 2015 , Tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah serta tolak ukur tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun Anggaran 2020 . Melalui penyusunan LAKIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good goverment, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas lingkungan pemerintah. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kota Depok .

Demikian LAKIP ini kami susun, semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Depok, Februari 2021

**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KOTA DEPOK**

Siti Chaerijah Aurijah, S.Pd, MM
Pembina Utama Muda IV/c
NIP . 19680408 199103 2 008

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
1.4 Isu-isu Strategis yang Dihadapi	6
1.5 Sistematika Penyusunan	7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Rencana Strategi 2011 – 2016	9
A. Visi	10
B. Misi	11
C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran	12
D. Strategi dan Kebijakan Dinas	15
2.2 Perjanjian Kinerja	16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	26
3.1.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahuni ini	27
3.1.2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan tahun – tahun Sebelumnya	30
3.1.3 Membandingkan Realisasai Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis	39
3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional	48
3.1.5 Ananlisis Penyeban Keberhasilan/Kegagalan atau Pening- katan/Penurunan Kinerja serta Alternatif yang telah di- Lakukan	50
3.1.6 Ananlisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	55
3.1.7 Ananlisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	61

3.2 Realisasi Anggaran	64
BAB IV PENUTUP	66



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT , atas limpahan syukur rahmat dan karuniaNya, maka Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Depok Tahun 2016 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu cara perbaikan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

LAKIP Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Depok Tahun 2016 merupakan Komitmen nyata Kantor Arsip dan Perpustakaan dalam Mengimplementasikan Sistem Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang baik sebagaimana di amanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor 53 Tahun 2015, Tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Adapun tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah serta tolak ukur tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Depok Tahun Anggaran 2016 . Melalui penyusunan Lakip juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good goverment, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas lingkungan pemerintah. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kota Depok .

Demikian LAKIP ini kami susun, semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Depok, Februari 2017
**Plt. KEPALA DINAS KEARSIPAN dan
PERPUSTAKAAN KOTA DEPOK**

Drs. ASEP RUSWANDA, MPd
Pembina Utama / IV c
NIP . 196411021990031010

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang kemudian digantikan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan oleh para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Pasal 1 Nomor 14, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014).

Akuntabilitas Kinerja yang dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja yaitu pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. LKIP ini sangat penting karena :

- 1) Memberi informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 2) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hal ini sejalan dengan Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab demi terselenggaranya *good governance* yang merupakan persyaratan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang aspiratif, mengutamakan kepentingan rakyat banyak, dan berkeadilan.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok, merupakan salah satu perangkat daerah di Kota Depok. Perangkat daerah ini awalnya bernama Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Depok, yang dibentuk pada Tahun 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib di Bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Depok sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok. Pada Tahun 2016, berdasarkan Peraturan Walikota Depok Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, perangkat daerah ini kembali berubah nama menjadi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 Ayat 2, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu Bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan.

1.2. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun Anggaran 2020 berlandaskan pada:

- a. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
- b. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

-
- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- e. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 - f. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 - j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 - k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
 - l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Utama;
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 - n. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

-
- o. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
 - p. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07) yang kemudian dicabut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 2);
 - q. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);
 - r. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 02);
 - s. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 7);
 - t. Peraturan Walikota Depok Nomor 61 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Kantor Arsip dan Perpustakaan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 61);
 - u. Peraturan Walikota Depok Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 79).
 - v. Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2020.

1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

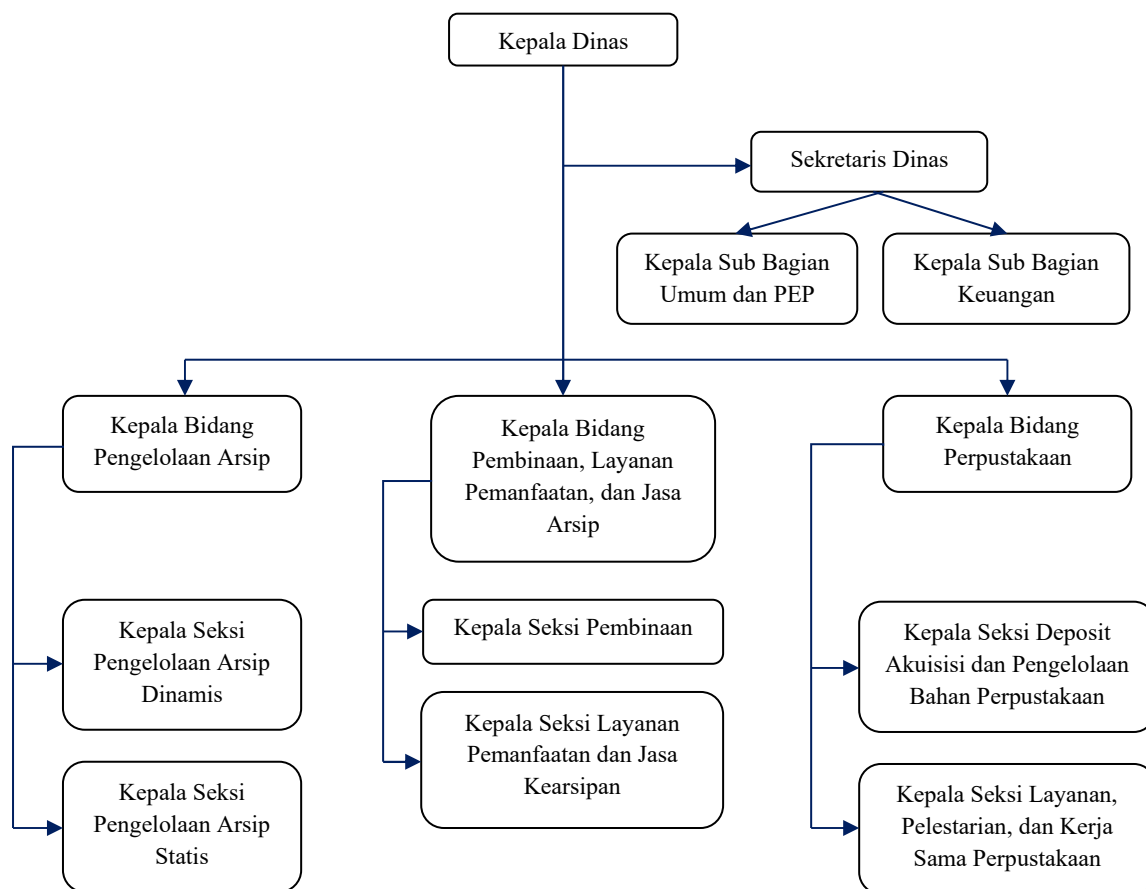
Sesuai Dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Kearsipan dan Perpustakaan (Pasal 2 Ayat 1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah (Pasal 2 Ayat 2).

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan Bidang Kearsipan dan Perpustakaan (Peraturan Walikota Depok Nomor 79 Tahun 2016 Pasal 2 Ayat 3).

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok menyelenggarakan fungsi (Peraturan Walikota Depok Nomor 79 Tahun 2016 Pasal 2 Ayat 4):

- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Kearsipan dan Perpustakaan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Kearsipan dan Perpustakaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok

1.4. ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI

Isu Strategis – Isu Strategis yang berkembang dan dihadapi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok pada Tahun 2020 berdasarkan Bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan seperti berikut ini:

NO	ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN STRATEGIS
1.	Bidang Kearsipan : Pengelolaan Arsip Sesuai Standar Baku Kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana dan Prasarana Pengelolaan Penyelamatan arsip/dokumen perlu di tingkatkan; • Kualitas pelayanan Bidang Kearsipan sebagai sumber informasi, bukti otentik dalam hukum, bukti sejarah, dan bukti penyelenggaraan pemerintahan dan bahan penelitian perlu ditingkatkan;

		<ul style="list-style-type: none"> • Integritas dan profesionalitas aparatur pelayanan Bidang kearsipan perlu ditingkatkan.
2.	Bidang Perpustakaan : Meningkatkan Pembudayaan Kegemaran Membaca Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana dan Prasarana pelayanan Perpustakaan perlu ditingkatkan; • Kualitas pelayanan Bidang Perpustakaan perlu ditingkatkan; • Integritas dan profesionalitas aparatur pelayanan Bidang Perpustakaan perlu ditingkatkan; • Minat baca masyarakat masih perlu ditingkatkan dengan menambah dan mempermudah akses dan fasilitas Perpustakaan.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kearsipan & Perpustakaan Kota Depok Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan tentang penjelasan umum Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok, tugas pokok dan fungsi dinas, struktur organisasi dinas, dan isu – isu strategis yang harus dihadapi selama pelaksanaan anggaran.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan tentang Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok termasuk di dalamnya Visi dan Misi Kota Depok beserta Misi yang harus diemban oleh dinas dan perjanjian kinerja yang telah disepakati dan ditandatangani antara Walikota Depok dan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menguraikan tentang capaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pada TA 2020 dan realisasi anggaran TA 2020. Perbandingan dan analisis dilakukan untuk menentukan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan TA 2020 dan kesesuaiannya dengan Perjanjian Kinerja TA 2020.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini disampaikan simpulan umum atas capaian pelaksanaan TA 2020 oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok dan langkah – langkah yang harus dilakukan di masa mendatang dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021

Perencanaan Strategis merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi dalam menentukan sasaran dan strategi atau kebijakan untuk mencapainya, serta pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya dalam mengoperasionalkan strategi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, rencana strategis adalah rancangan atau konsep dalam menggunakan sumber daya suatu organisasi/bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam situasi tertentu. Menurut Kerzner (2001), perencanaan strategis (strategic planning) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi di masa depan sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju lima (5) sampai sepuluh (10) tahun ke depan. Sejalan dengan berbagai pengertian tersebut, Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non – kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional (Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 272 ayat 2 dan ayat 3).

Dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam lima tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan lokal, nasional maupun global. Melalui pendekatan Rencana Strategis yang tepat dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

Rencana strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun 2016 – 2021 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi perencanaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan cita – cita dan tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Meskipun demikian, rencana strategis ini masih memerlukan

perbaikan agar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan & Perpustakaan Kota Depok adalah :

1. Memberikan arah tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima (5) tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok dalam mendukung Visi dan Misi Kota Depok;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok untuk kurun waktu lima (5) tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahunan.

A. VISI

Dalam rangka mewujudkan cita – cita dan tujuan Pembangunan Jangka Panjang Kota Depok, dibutuhkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai rencana tahapan pembangunan lima tahunan. Setiap tahapan tersebut dibuatkan Visi agar pembangunan yang dilakukan fokus pada suatu keadaan yang diinginkan. Visi adalah keadaan umum yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 47). Visi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok pada Pembangunan Jangka Menengah Tahap ke – 3 yaitu

Tahun 2016– 2021 sama dengan Visi Pemerintahan Kota Depok, yaitu mewujudkan ***Kota Depok Yang Unggul, Nyaman, dan Religius***.

Penjelasan dan penjabaran visi tersebut di atas sebagai berikut :

a. Unggul

Menjadi yang terbaik dan terdepan dalam memberikan pelayanan publik, pengembangan ekonomi yang kokoh dan berkeadilan berbasis industri kreatif, dan pengembangan sumber daya manusia yang bertumpu pada ketahanan keluarga.

b. Nyaman

Terciptanya suatu kondisi ruang kota yang bersih, sehat, asri, harmonis, berwawasan lingkungan, dan ramah bagi kehidupan masyarakat.

c. Religius

Terjaminnya hak – hak masyarakat dalam menjalankan kewajiban agama bagi masing – masing pemeluknya, yang tercermin dalam peningkatan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemuliaan dalam akhlak, moral, dan etika serta berwawasan kenegaraan dan kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

B. MISI

Untuk mewujudkan Visi Kota Depok di atas maka diperlukan suatu misi sebagai cara untuk mencapai dan mewujudkan visi tersebut. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 48). Misi Kota Depok dapat dilihat berikut ini :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan;
- 2) Mengembangkan sumber daya manusia yang religius, kreatif, dan berdaya saing;
- 3) Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan berbasis Ekonomi Kreatif.

- 4) Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan, dan ramah keluarga;
- 5) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai – nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan Misi Kota Depok tersebut di atas, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok memiliki kewajiban untuk menjalankan Misi ke – 1 dan Misi ke – 2.

C. TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Dalam rangka melaksanakan upaya – upaya (misi) untuk mewujudkan mimpi (visi) setiap tahapan lima tahunan, setiap Perangkat Daerah perlu menetapkan tujuan instansinya berdasarkan misi yang akan diembannya. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima (5) tahunan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 49).

Setiap tujuan akan memiliki target atau sasaran yang akan dituju. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 50).

Setiap sasaran harus memiliki sesuatu yang terukur agar dapat menentukan keberhasilan/kegagalan suatu tujuan. Karena itulah, diperlukan Indikator Kinerja Sasaran. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), atau dampak (*impact*) (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 58).

Tujuan, sasaran, dan indikator kinerja sasaran dapat dilihat sesuai dengan Misi Kota Depok yang diemban oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok seperti di bawah ini.

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik perpustakaan dan kearsipan

Sasaran 1 : Meningkatkan Kinerja Pelayanan (Pelayanan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan)

Sasaran 2 : Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Misi 2 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kreatif, dan Berdaya Saing

Tujuan 1 : Meningkatnya Minat Baca / Gemar Membaca di Masyarakat

Sasaran 1 : Meningkatnya akses terhadap layanan perpustakaan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE		
				2019	2020	2021
1	Meningkatnya kualitas layanan publik perpustakaan dan kearsipan	1. Meningkatnya Kinerja Layanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM (Pengguna layanan)	baik	baik	baik
			Persentase (%) lembaga pemerintahan yang telah mengelola arsipnya secara baku	21,4%	21,4%	21,4%
		2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Predikat SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang semakin baik	C	B	BB
1	Meningkatnya Minat Baca/Gemar Membaca di Masyarakat	1. Meningkatnya akses terhadap layanan perpustakaan termasuk perpustakaan keliling 2. Meningkatnya jumlah pemustaka	Persentase (%) Minat Baca Masyarakat (asumsi dasar persentase minat baca Provinsi Jawa Barat sebesar 30% untuk TA 2016)	45,00	50,00	55,00
			Jumlah Pemustaka / Pengunjung yang datang ke Perpustakaan Umum Kota Depok	33000	35000	37000
			Jumlah Koleksi Bahan Pustaka (dalam eksemplar)	32000	37000	42000
			Jumlah Perpustakaan di Kota Depok yang dibina	25	-	-
			Persentase Jumlah Perpustakaan di Kota Depok yang dibina	-	11,11%	21,53% (11,11 % + 10,42 %)

Tabel 1. Tabel Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok (Sesuai Renstra Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun 2016 – 2021)

D. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok, maka perlu dilakukan strategi dan kebijakan seperti diuraikan dalam Tabel 2 berikut ini.

VISI : Kota Depok yang Unggul, Nyaman, dan Religius			
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan transparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas layanan publik perpustakaan dan kearsipan	1. Meningkatnya kualitas manajemen/pengelolaan perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan Standar Nasional Perpustakaan (SNP 003 : 2011) dalam pengelolaan Perpustakaan Umum Daerah Kota Depok 2. Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi terbaru sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Perpustakaan seperti <i>e-Library / e-Book</i>; 3. Mengadakan kerja sama dengan perpustakaan – perpustakaan yang ada di Kota Depok seperti perpustakaan perguruan tinggi setempat dan perpustakaan sekolah dalam rangka saling melengkapi bahan koleksi perpustakaan; 4. Menginventarisasi hasil – hasil kegiatan instansi – instansi pemerintahan Kota Depok dalam rangka mengumpulkan data – data hasil pembangunan pemerintahan Kota Depok sehingga mudah diakses masyarakat melalui Perpustakaan Umum Daerah Kota Depok; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan prioritas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok agar meningkatkan anggaran belanja; 2. Meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan; 3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta SDM
	2. Meningkatnya kualitas manajemen/pengelolaan kearsipan	<ol style="list-style-type: none"> 5. Menerapkan tata kelola kearsipan secara baku sesuai standar ANRI; 6. Pengembangan arsip elektronik; 7. Peningkatan kualitas & kuantitas SDM kearsipan; 8. Pembuatan JRA dan pengelolaan pemusnahan arsip. 	
Terwujudnya kinerja dinas yang akuntabel.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja; 2. Memberikan pelatihan pada pegawai untuk pengelolaan dan perencanaan aset; 3. Memberikan pelatihan dan/atau bimbingan teknis bagi pegawai yang terlibat dalam PEP. 	Peningkatan kompetensi dan pemahaman pegawai tentang budaya kerja dan Reformasi birokrasi.

Misi 2: Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kreatif, dan Berdaya Saing			
Meningkatnya Minat Baca/Gemar Membaca di Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses terhadap layanan perpustakaan termasuk perpustakaan keliling 2. Meningkatkan jumlah pemustaka 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Gedung Perpustakaan; 2. Penyusunan Standarisasi Pengelolaan Perpustakaan Umum Daerah; 3. Pengembangan perpustakaan 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Perpustakaan; 5. Promosi gemar membaca dan gemar berkunjung ke perpustakaan; 6. Pengembangan perpustakaan - masyarakat; 7. Road show perpustakaan keliling; 8. Mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan gemar membaca seperti bedah buku, lomba membaca puisi, lomba mendongeng, lomba pidato, dan lain – lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Perpustakaan Daerah; 2. Pengembangan Perpustakaan Keliling.

Tabel 2. Strategi dan Kebijakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok untuk Tahun 2016 – 2021
 (Berdasarkan Renstra Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun 2019– 2021)

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun – tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja tiap tahunnya (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Lampiran I).

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja ini, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Lampiran I, sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan *monitoring*, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja yang disusun oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok pada TA 2020 ini dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok telah menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja yang akan dicapai serta program dan kegiatan berikut alokasi anggaran yang akan dilaksanakan melalui Dokumen Penetapan Kinerja seperti Tabel 3 berikut ini.

SASARAN	INDIKATORSASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD 2020 (Rp)	PERUBAHAN APBD 2020 (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
2	3	4	5	5	6	7	8
URUSAN KEARSIPAN					3.228.366.700	2.065.500.100	-1.162.866.600
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA DEPOK							
Meningkatnya Kinerja Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM (Pengguna layanan)	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100%	619.535.000	413.538.000	-205.997.000
	Persentase (%) lembaga pemerintahan yang telah mengelola arsipnya secara baku	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang tersedia	58 jenis	84.996.000	84.996.000	0
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak yang tersedia	16 jenis	55.000.000	55.000.000	0
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang tersedia	17 jenis	44.995.000	44.995.000	0
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat RT yang tersedia	44 jenis	74.000.000	74.000.000	0
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Mamin yang tersedia	5 jenis	90.000.000	40.375.000	-49.625.000
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas yang tersia	104 OH Dalam Daerah, 129 OH Luar Daerah	270.544.000	114.172.000	-156.372.000
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	345.932.000	102.931.000	-243.001.000

	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan	2 gedung	50.000.000	25.000.000	-25.000.000
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah pemeliharaan	5 kendaraan roda 4, 3kendaraan roda 2	95.000.000	47.500.000	-47.500.000
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan	4 jenis	60.988.000	30.431.000	-30.557.000
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	0	139.944.000	0	-139.944.000
	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR	Prosentase Pegawai Yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi	100%	215.500.000	14.930.000	-200.570.000
	Bimtek manajemen kearsipan dan perpustakaan bagi aparatur Diskarpus	Jumlah orang	0	85.000.000	0	-85.000.000
	Bimbingan Teknis Kearsipan bagi OPD	Jumlah Orang	0	90.000.000	14.930.000	-75.070.000
	Workshop Kearsipan	Jumlah orang	0	40.500.000,00	0	-40.500.000
	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMATIKA	Cakupan Layanan e-Government Yang Terintegrasi	100%	72.000.000	72.000.000	-
	Pemeliharaan Sistem Kearsipan	Jumlah Sistem	1 Sistem	72.000.000	72.000.000	-
	PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN	Cakupan Integrasi Perencanaan	100%	234.309.900	234.309.900	-
	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen Renja	43.999.900	43.999.900	-
	Penyusunan Raperda Kearsipan	Jumlah Dokumen	1 Dok perda	190.310.000	190.310.000	-
	PENINGKATAN PENGELOLAAN KEARSIPAN	Presentase Pengelolaan dan Layanan Lembaga Kearsipan Daerah	21,40%	1.729.090.000	1.215.791.400	-513.298.600
	Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku	Jumlah yang dibina	22 kelurahan	909.185.000	842.808.800	-66.376.200
	Penelusuran Arsip Bersejarah	Jumlah objek	0	58.850.000	1.386.000	-57.464.000
	Pengembangan Pedoman Kearsipan	Jumlah Pedoman	0	60.000.000	0	-60.000.000
	Sosialisasi Kearsipan	Jumlah Orang	50 orang	129.400.000	45.122.000	-84.278.000
	Pengawasan Internal Kearsipan se Kota Depok	Jumlah PD	50 Perangkat Daerah	89.000.000	89.000.000	0
	Penyediaan Diorama/ Wall of Fame	Jumlah kegiatan	0	128.770.000	0	-128.770.000
	Penambahan Khasanah Arsip Aduvisual	Jumlah lomba	1 lomba	100.000.000	100.000.000	0
	Akuisisi Arsip Statis	Jumlah berkas	0	66.560.000	0	-66.560.000
	Pengelolaan Pemasarakatan Arsip	jumlah lokasi	35 lokasi	134.325.000	88.300.000	-46.025.000

		Layanan Jasa Kearsipan	Jumlah orang	110 orang	53.000.000	49.174.600	-3.825.400
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Predikat SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang semakin baik	PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai Sakip	B	11.999.800	11.999.800	-
		Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	11.999.800	11.999.800	-
URUSAN PERPUSTAKAAN					2.123.052.700	1.426.233.900	-696.818.800
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA DEPOK							
Meningkatnya akses terhadap layanan perpustakaan	Persentase (%) Minat Baca Masyarakat (asumsi dasar persentase minat baca Provinsi Jawa Barat sebesar 30% untuk TA 2016)	Pningkatan Minat Baca Masyarakat	Prosentase Minat Baca Masyarakat	50%	2.123.052.700	1.426.233.900	-696.818.800
	Jumlah Pemustaka / Pengunjung yang datang ke Perpustakaan Umum Kota Depok	Penyediaan Koleksi Buku Bacaan Perpustakaan	Jumlah buku	3.000 eksp, 1 paket e-book, 50 dvd	621.949.000	377.509.000	-244.440.000
	Jumlah Koleksi Bahan Pustaka (dalam eksemplar)	Pengolahan Koleksi Bahan Perpustakaan	Jumlah bahan perpustakaan	5.000 eks	538.748.900	532.454.900	-6.294.000
	Persentase Jumlah Perpustakaan di Kota Depok yang dibina	Pembinaan Perpustakaan dengan E-Library	Jumlah perpustakaan yang dibina	5 perpustakaan	40.080.000	40.584.600	504.600
		Bimbingan Teknis Perpustakaan Bagi Pengelola Perpustakaan Sekolah	Jumlah orang yang dibimtek	0	129.999.800	0	-129.999.800
		Preservasi dan Konservasi Bahan Pustaka	Jumlah buku	1.000 eksp	22.500.000	22.500.000	0
		Pelayanan Perpustakaan Keliling	Jumlah pelayanan	350 titik	299.425.000	288.610.600	-10.814.400
		Pemasyarakatan Gemar Membaca	Jumlah pemasyarakatan	0	275.350.000	34.574.900	-240.775.100
		Pembinaan Taman Bacaan Masyarakat	Jumlah TBM	4 TBM	100.000.000	49.999.900	-50.000.100
		Penataan Perpustakaan Kelurahan	Jumlah perpustakaan yang ditata	0	15.000.000	0	-15.000.000
Survey Minat Baca Masyarakat		jumlah dokumen	1 dokumen	80.000.000	80.000.000	0	
JUMLAH					5.351.419.400	3.491.734.000	-1.859.685.400

Tabel 3. Penetapan Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok TA 2020

Berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja di atas dapat dilihat bahwa pada TA 2020, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok telah menetapkan 3 sasaran strategis dan 7 indikator kinerja sasaran strategis dan target kinerja yang akan dicapai

melalui 8 program dan 37 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp 5.351.419.400,-**. Namun dalam pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 mengalami perubahan sebagai akibat dari Pandemi Covid 19, untuk itu dalam perlanannya anggaran mengalami Refocusing dan penyesuaian pelaksanaan diberbagai kegiatan. Akibat refocusing dan perubahan anggaran APBD tahun 2020 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok mengalami penyesuaian **berkurang sebesar Rp. 1.859.685.400,-**. Jadi APBD tahun 2020 sebesar **Rp. 3.491.734.000,-**.

Dari rencana kegiatan 8 Program dan 37 kegiatan, yang dapat dilaksanakan hanya 7 Program dan 26 kegiatan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan dari pelaporan kinerja ini adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Lampiran II).

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok, selaku pengemban amanah masyarakat Kota Depok dalam hal Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan, wajib melaksanakan secara transparan dan akuntabel. Transparan artinya membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Akuntabel artinya setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 5 dan Pasal 6 ayat 1 dan ayat 5). Karena itulah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menyajikannya melalui pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP). Pembuatan LAKIP tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran, perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya, perbandingan capaian kinerja dengan target jangka menengah, faktor – faktor penyebab keberhasilan/kegagalan, dan akuntabilitas keuangan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan & Perpustakaan Kota Depok.

Capaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi dijelaskan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja seperti berikut ini.

3.1.1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun Anggaran 2019, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah menetapkan 3 sasaran strategis dengan 7 indikator sasaran strategis yang akan dicapai pada kurun waktu tahun 2020, sesuai dengan misi 1 dan misi 2 RPJMD tersebut. Setelah Tahun Anggaran 2020 berakhir, capaian kinerja dari sasaran tersebut diukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalannya dengan menggunakan Formulir Pengukuran Kinerja Tahun Anggaran 2020. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
MISI 1 : Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Profesional dan Transparan				
1. Meningkatnya Kinerja Layanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat/ IKM (Pengguna Layanan)	Baik	Baik	100%
	Prosentase (%) jumlah lembaga pemerintahan yang telah mengelola arsipnya secara baku	21,4 %	48,42 %	226,26 %
2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Predikat Sakip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok	B	B	100%
MISI 2 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kreatif dan Berdaya Saing				
1. Meningkatnya akses terhadap layanan perpustakaan	Prosentase (%) Minat Baca Masyarakat	50 %	66,37 %	132,74 %
	Jumlah Pemustaka/ Pengunjung yang datang ke Perpustakaan Umum Kota Depok	35.000 orang	27.345 orang	78,13 %
	Jumlah Koleksi Bahan Pustaka (dalam Eksemplar)	37.000 eks	47.714 eks	128,96 %
2. Meningkatnya Jumlah Pemustaka	Persentase Perpustakaan di Kota Depok Yang Dibina	11,11%	3,70%	33,34 %

Tabel 4. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan TA 2020

Berdasarkan Tabel 4 di atas, capaian kinerja dapat diklasifikasikan menjadi dua (3) bagian yaitu **Capaian Kinerja Sesuai Target (100%)** dan **Capaian Kinerja Melebihi Target (> 100%)** dan **Capaian Kinerja Kurang Target (< 100%)** :

- a) **Capaian Kinerja Sesuai Target (100%)** terdapat 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja :
 1. Meningkatnya Kinerja Layanan Perangkat Daerah dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat/ IKM (Pengguna Layanan);
 2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan Indikator Predikat Sakip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok;
- b) **Capaian Kinerja Melebihi Target (>100%)** terdapat 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja :
 1. Meningkatnya Kinerja Layanan Perangkat Daerah dengan Indikator Prosentase (%) jumlah lembaga pemerintahan yang telah mengelola arsipnya secara baku;
 2. Meningkatnya akses terhadap layanan perpustakaan dengan Indikator Prosentase (%) Minat Baca Masyarakat
 3. Meningkatnya Jumlah Pemustaka dengan Indikator :
 - a. Jumlah Koleksi Bahan Pustaka (dalam Eksemplar)
- c) **Capaian Kinerja Kurang Target (<100%)** terdapat 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja :
 1. Meningkatnya Jumlah Pemustaka dengan Indikator
 - a. Jumlah Pemustaka/ Pengunjung yang datang ke Perpustakaan Umum Kota Depok
 - b. Persentase Perpustakaan di Kota Depok Yang Dibina

3.1.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Tahun – Tahun Sebelumnya

Perbandingan ini hanya dapat dilakukan antara TA 2020 dengan TA 2019 Selain itu, RPJMD yang digunakan pada TA 2020 adalah RPJMD Kota Depok Tahun 2016 – 2021 sedangkan saat ini RPJMD yang digunakan adalah RPJMD Kota Depok Tahun 2019-2021. Adapun perbandingan realisasi kinerja antara TA 2018 dan TA 2019 serta tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan TA. 2018, TA. 2019 dengan TA. 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET			REALISASI			CAPAIAN (%)		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Kinerja Layanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat/ IKM (Pegguna Layanan)	Persen	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	100 %	100 %	100%
	Prosentase (%) lembaga pemerintahan yang telah mengelola arsipnya secara baku	Persen	21,4%	21,4 %	21,4 %	20,36 %	21,7 %	48,42%	95,14 %	104%	226,26%
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Predikat Sakip Dinas Kerasipan dan Perpustakaan Kota Depok	Persen	C	C	B	C	B	B	100 %	100 %	100%
Meningkatnya akses terhadap layanan perpustakaan	Prosentase (%) Minat Baca Masyarakat	Persen	35 %	45 %	50 %	64 %	64,88 %	66,37%	182,86 %	144,18 &	132,74%
	Jumlah Pemustaka/ Pengunjung yang datang ke Perpustakaan Umum Kota Depok	ORANG	31.000 orang	33.000 orang	35.000 orang	73.555 orang	80.960 orang	27,345 orang	237,27 %	245,33 %	78,13%
	Jumlah Koleksi Bahan Pustaka (dalam Eksemplar)	EKSP	27.000	32.000 eks	37.000 eks	38.767 eks	44.887 eks	47.714 eks	143,58 %	140,27 %	128,96%
	Jumlah Perpustakaan di Kota Depok Yang Dibina	TBM	15 TBM (akumulasi dari target 2017 5, dan 2018 10 TBM)	25 TBM (akumulasi dari target 2017 5, 2018 10 dan 2019 10 TBM)	-	15 TBM	26 TBM (akumulasi dari realisasi 2017 5, 2018 10 dan 2019 11 TBM)	-	100 %	104 %	-

Persentase Perpustakaan di Kota Depok Yang Dibina	Persen			11,11%			3,30%			33,34%
--	--------	--	--	--------	--	--	-------	--	--	--------

Dari tabel di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan pelayanan publik yang professional dan transparan

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas Pelayanan

Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas manajemen dalam pelayanan publik

Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Berdasarkan Misi 1 dan Tujuan 1 RPJMD Kota Depok Tahun 2016 – 2021, berhasil dilaksanakan dengan baik dan tercapai 100% dan lebih > 100 %

Hal tersebut dikarenakan tingkat kesadaran Perangkat Daerah dalam pengelolaan arsipnya sehingga mengajukan pendampingan ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok dalam menata arsipnya secara baku.

Misi 2 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang kreatif dan berdaya saing

Tujuan 1 : Meningkatkan minat baca/ gemar membaca masyarakat

Sasaran 1 : Meningkatkan akses terhadap layanan perpustakaan termasuk perpustakaan keliling

Realisasi capaian kinerja Sasaran ke – 2 pada Misi 2 dan Tujuan 1 RPJMD Kota Depok Tahun 2016 – 2021 indikator kerjanya terkait dengan Bidang Perpustakaan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a. Indikator kinerja tersedianya koleksi buku perpustakaan, sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan dengan jumlah buku sebanyak **447.714 eksemplar dan judul buku sebanyak 22.863 judul.**
- b. Indikator kinerja terlaksananya layanan perpustakaan keliling sesuai jadwal dan kebutuhan masyarakat, sampai dengan tahun 2016 telah berhasil menjangkau 1.067 lokasi dengan hanya 2 mobil keliling (penambahan 1 unit mobil pusling pada tahun 2016). Pada tahun 2017, dengan 3 (tiga) mobil pusling, berhasil menjangkau 300 titik lokasi. Pada tahun 2018 sebanyak 450 titik Dan Pada tahun 2019 sebanyak 500 titik dengan mobil 4 (empat) . Hal ini sesuai target indikator 100%. Karena itu sampai dengan tahun 2018 telah melayani 1.837 titik lokasi, bertambah 500 titik pada tahun 2019 sehingga menjadi 2.337 titik lokasi. Lokasi – lokasi pelayanan sejauh ini masih atas

dasar permintaan sekolah – sekolah baik itu TK/PAUD, SD, maupun SMP. Beberapa di antaranya saat even – even seperti ulang tahun Kota Depok. Saat saat sekarang sudah ada penambahan pusling di tempat – tempat keramaian seperti pada hari Sabtu dan Minggu, pelayanan umum, puskesmas, kantor layanan pemerintah dan taman-taman di Kota Depok. Namun pada **tahun 2020** dimana tahun ini adalah tahun pandemi covid -19 berpengaruh pada target capaian titik lokasi pelaksanaan perpustakaan keliling yaitu hanya **350 titik**

- c. Indikator kinerja jumlah perpustakaan atau Taman Bacaan Masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Jumlah perpustakaan kelurahan sampai dengan tahun 2017 terealisasi sebanyak 83 kelurahan, dan bertambah lagi 10 TBM dan 8 kelurahan jadi sampai dengan 2018 terealisasi sebanyak 101 TBM dan Pada tahun 2019 bertambag 15 TBM sehingga menjadi 116 TBM yang tersebar di seluruh kelurahan di Kota Depok,.
 2. Taman Bacaan Masyarakat (TBM), sampai dengan tahun 2018, telah berhasil dibantu sebanyak 99 TBM. Pada tahun 2019 berhasil membantu melengkapi koleksi buku – bukunya sebanyak 11 TBM yang telah diidentifikasi oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok. Jadi total TBM yang sudah difasilitasi sebanyak 110 TBM. dan pada tahun 2020 untuk lebih dapat melihat sejauh mana keberhasilan pembinaan perpustakaan inikator berubah menjadi persentase perpustakaan yang dibina, yaitu pada tahun **2020 target 11,11% dan terealisasi 3,70%**

3.1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sampai dengan TA 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2019 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET SAMPAI DENGAN TAHUN 2020 (Sesuai Target Renstra)	REALISASI SAMPAI DENGAN TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2020 (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Kinerja Layanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat/ IKM (Peguna Layanan)	%	BAIK	BAIK	100	Bersifat Non Kumulatif
	Prosentase (%) jumlah lembaga pemerintahan yang telah mengelola arsipnya secara baku	%	21,4	48,42%	226,26	Bersifat Kumulatif Awal Kondisi 1,81 %, 2018 6,79, 2019 21,7 jadi s/d 2020 = 78,72 % Target akhir 100%
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Predikat Sakip Dinas Kerasipan dan Perpustakaan Kota Depok	%	B	B	100	Bersifat Non Kumulatif
Meningkatnya akses terhadap layanan perpustakaan	Prosentase (%) Minat Baca Masyarakat	%	50	66,37	132,74	Bersifat Non Kumulatif
	Jumlah Pemustaka/ Pengunjung yang datang ke Perpustakaan Umum Kota Depok	orang	35.000	27.345	78,13	Bersifat Kumulatif Jumlah pengunjung kondisi (73.555 th 2018 , 80.960 th 2019) Total 154.515 orang Target akhir RPJMD 217.961 orang)
	Jumlah Koleksi Bahan Pustaka (dalam Eksemplar)	eksp	37.000	47.714	128,96	Bersifat Kumulatif (Pencapaian s/d th 2019 44.887eks)
	Persentase Perpustakaan di Kota Depok Yang Dibina	%	11,11%	3,70%	33,34%	Bersifat Kumulatif (Pencapaian th 2018 5 TBM, 2018 10 TBM dan 2019 11 TBM)

Tabel 6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan Target RPJMD Sesuai Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2019 – 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sampai dengan Tahun 2020, dibandingkan dengan target jangka menengah, terdapat capaian kinerja dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis Meningkatkan Kinerja Layanan Perangkat Daerah ::
 - a. Indikator Kinerja Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pengguna layanan dengan capaian sebesar 100%
 - b. Indikator Kinerja Sasaran Prosentase (%) jumlah lembaga pemerintahan yang telah mengelola arsipnya secara baku sebesar dengan capaian 226,26%
2. Sasaran Strategis Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan Indikator Kinerja Sasaran Predikat Sakip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok dengan capaian sebesar 100 %
3. Sasaran Strategis Meningkatnya akses terhadap layanan perpustakaan dengan :
 - a. Indikator Sasaran Prosentase (%) Minat Baca Masyarakat dengan capaian 132,74%
 - a. Indikator Kinerja Sasaran Jumlah Pemustaka/ Pengunjung yang datang ke Perpustakaan Umum Kota Depok dengan capaian 78,13 %
 - b. Indikator Kinerja Sasaran Jumlah Koleksi Bahan Pustaka (dalam Eksemplar) dengan capaian 128,96 %
 - c. Indikator Kinerja Sasaran Persentase Perpustakaan di Kota Depok Yang Dibina dengan capaian 33,34 %

3.1.4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Dalam mencapai Sasaran Strategis ke – 2 Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan kualitas layanan pendidikan dari Misi ke – 2 dan Tujuan ke – 2 RPJMD Kota Depok tahun 2016 – 2021, terkait dengan Bidang Perpustakaan, ditempuh dengan menetapkan kebijakan Pengembangan Perpustakaan Daerah, dengan strategi pembangunan gedung perpustakaan, penyusunan standarisasi pengelolaan Perpustakaan Umum Daerah, pengembangan perpustakaan elektronik/digital, dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Perpustakaan. Untuk Bidang Kearsipan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok mengadakan Penyusunan Pedoman Kearsipan dalam rangka mendukung Tata Naskah, Kode Klasifikasi, JRA (Jadual Retensi Arsip), dan Keamanan Akses. Hal ini sesuai dengan

Peraturan Kepala ANRI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip.

Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Peningkatan Minat Baca Masyarakat, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok melakukan berbagai kegiatan menyesuaikan dengan Standar Nasional Perpustakaan, antara lain:

1. Mengadakan berbagai kegiatan terkait pemasyarakatan gemar membaca;
2. Mengadakan pelayanan perpustakaan keliling;
3. Membantu pengadaan koleksi buku bagi Taman Baca Masyarakat (TBM) maupun perpustakaan – perpustakaan di kelurahan;
4. Menyiapkan naskah akademik Raperda Gemar Membaca.

Realisasi tahun 2020 terkait dengan Standar Nasional Perpustakaan 003: 2011 tentang Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini.

No	Program/Kegiatan	Target RPJMD TA 2020	Realisasi TA 2020	Keterangan
1	Penyediaan Koleksi Buku Perpustakaan	5.000 eks buku, 1 paket e-book, 50 dvd	3000 eks buku, 1 paket e-book, 50 dvd	60,40 %
4	Layanan Perpustakaan Keliling	500 titik	350 titik	70%

Tabel 7. Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Yang Mendukung Standar Nasional

Untuk koleksi Perpustakaan Umum Kota Depok, Perpustakaan Umum Kota Depok baru memiliki 22.863 judul buku dengan 47.714 eksemplar, sedangkan Standar Nasional Perpustakaan 2011 menyatakan bahwa untuk Kota Depok dengan jumlah penduduk sekitar 2.000.000 jiwa, minimal harus memiliki 50.000 judul buku dengan tiap bukunya ada 3 eksemplar maka harus memiliki koleksi buku minimal 150.000 eksemplar. Selain itu, Gedung Perpustakaan Kota Depok baru memiliki luas 2.096,85 m² dengan Ruang Perpustakaannya seluas 645,05 m². Hal ini tentu saja masih jauh dari Standar Nasional Perpustakaan 2011 yang menyatakan bahwa luas gedung perpustakaan minimal 0,008 m² per kapita dikalikan jumlah penduduk kabupaten/kota sehingga untuk Kota Depok diperlukan luas Gedung Perpustakaan Umum minimal 16.000 m². Hal ini tentu saja harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Depok.

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap realisasi kinerja sasaran seperti yang tertuang dalam Formulir Pengukuran Kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan. Evaluasi dan analisis yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel 8. Perbandingan Target dan Pencapaian Kinerja TA. 2020

Indikator Kinerja	Target RPJMD untuk TA 2020	Realisasi TA 2020	Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
Indeks Kepuasan Masyarakat/ IKM (Pengguna Layanan)	Baik	Baik	100%	Target Tercapai
Prosentase (%) jumlah lembaga pemerintahan yang telah mengelola arsipnya secara baku	21,4 %	48,42 %	226,26 %	Target Tercapai
Predikat Sakip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok	B	B	100%	Target Tercapai
Prosentase (%) Minat Baca Masyarakat	50%	66,378 %	132,74 %	Target Tercapai
Jumlah Pemustaka/ Pengunjung yang datang ke Perpustakaan Umum Kota Depok	35.000 orang	27.345 orang	78,13 %	Target Tidak Tercapai
Jumlah Koleksi Bahan Pustaka (dalam Eksemplar)	37.000 eks	47.714 eks	128,96 %	Target Tercapai
Persentase Perpustakaan di Kota Depok Yang Dibina	11,11%)	3,70%	33,34 %	Target Tidak Tercapai

Target kinerja tersebut diatas tentunya didukung pencapaian target program dan kegiatan, seperti tertuang dalam tabel tersebut dibawah ini :

**Tabel 9. CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA DEPOK**

	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PROSENTASE (%)
I	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100%	100%	92,56 %
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang tersedia	58 jenis	58 jenis	100%
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak yang tersedia	16 jenis	16 jenis	100%
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang tersedia	17 jenis	17 jenis	100%
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat RT yang tersedia	44 jenis	44 jenis	100%
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Mamin yang tersedia	5 jenis	5 jenis	100%
6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas yang tersia	104 OH Dalam Daerah, 129 OH Luar Daerah	104 OH Dalam Daerah, 129 OH Luar Daerah	100%
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	50%	100%
7	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan	2 gedung	2 gedung	100%
8	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah pemeliharaan	5 kendaraan roda 4, 3 kendaraan roda 2	5 kendaraan roda 4, 3 kendaraan roda 2	100%
9	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan	4 jenis	4 enis	100
10	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	0	-	0
III	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR	Prosentase Pegawai Yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi	100%	0	0
11	Bimtek manajemen Kearsipan dan Perpustakaan bagi Aparatur Diskarpus	Jumlah orang	0	-	0
12	Bimbingan Teknis Kearsipan bagi OPD	Jumlah Orang	0	-	0
13	Workshop Kearsipan	Jumlah orang	0	-	0
IV	PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai Sakip	B	B	100%
14	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

V	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN TEHNOLOGI INFORMATIKA	Cakupan Layanan e-Government Yang Terintegrasi	100%	100%	100%
15	Pemeliharaan Sistem Kearsipan	Jumlah Sistem	1 Sistem	1 Sistem	100%
VI	PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN	Cakupan Integrasi Perencanaan	100%	100%	100%
16	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen Renja	2 Dokumen Renja	100%
17	Penyusunan Raperda Kearsipan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen Perda	1 Dokumen Perda	100%
VII	PENINGKATAN PENGELOLAAN KEARSIPAN	Presentase Pengelolaan dan Layanan Lembaga Kearsipan Daerah	21,40%	48,42 %	226,26 %
18	Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku	Jumlah yang dibina	22 kelurahan	22 kelurahan	100%
19	Penelusuran Arsip Bersejarah	Jumlah objek	2 objek	-	0
20	Penambahan Khasanah Arsip Audivisual	Jumlah lomba	1 lomba	1 lomba	100%
21	Pengembangan Pedoman Kearsipan	Jumlah Pedoman	1 Pedoman	-	0
22	Akuisisi Arsip Statis	Jumlah berkas	30 berkas	-	0
23	Sosialisasi Kearsipan	Jumlah Orang	50 orang	50 orang	100%
24	Pengawasan Internal Kearsipan se Kota Depok	Jumlah PD	50 titik	50 titik	100%
25	Penyediaan Diorama/ Wall of Fame	Jumlah kegiatan	1 kegiatan	-	0
26	Pengelolaan Pemasarakatan Arsip	jumlah lokasi	35 lokasi	35 lokasi	100%
27	Layanan Jasa Kearsipan	Jumlah orang	110 orang	110 orang	100%
VIII	Pningkatan Minat Baca Masyarakat	Prosentase Minat Baca Masyarakat	50%	66,37%	132,37 %
28	Penyediaan Koleksi Buku Bacaan Perpustakaan	Jumlah buku	3.000 eksp, 1 paket e-book, 50 dvd	3.000 eksp, 1 paket e-book, 50 dvd	100%
29	Pengolahan Koleksi Bahan Perpustakaan	Jumlah bahan perpustakaan	5.000 eks	5000 eks	100%
30	Preservasi dan Konservasi Bahan Pustaka	Jumlah buku	1.000 eksp	1000 eksp	100%
31	Pembinaan Perpustakaan dengan E-Library	Jumlah perpustakaan yang dibina	5 perpustakaan	5 perpustakaan	100%
32	Bimbingan Teknis Perpustakaan Bagi Pengelola Perpustakaan Sekolah	Jumlah orang yang dibimtek	100 orang	-	0
33	Pelayanan Perpustakaan Keliling	Jumlah pelayanan	350 tittik	350 titik	100 %

34	Pemasyarakatan Gemar Membaca	Jumlah pemasyarakatan	6 jenis lomba, 3 x bedah buku, 1 x pelatihan, 2 X sosialisasi, 1x FGD	-	0
35	Pembinaan Taman Bacaan Masyarakat	Jumlah TBM	4 Taman Bacaan	4 Taman Bacaan	100 %
36	Penataan Perpustakaan Kelurahan	Jumlah perpustakaan yang ditata	10 kelurahan	-	0
37	Survey Minat Baca Masyarakat	jumlah dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %

3.1.6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan RPJMD Perubahan Tahun 2019 – 2021 dan Rencana Kerja TA 2020, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis dari 2 (dua) Misi dan 2 (dua) tujuan. Sasaran Strategis – Sasaran Strategis tersebut adalah :

1. Meningkatkan Kinerja Layanan Perangkat Daerah
 - a. Indikator Kinerja Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pengguna layanan dengan capaian sebesar 100%
 - b. Indikator Kinerja Sasaran Prosentase (%) jumlah lembaga pemerintahan yang telah mengelola arsipnya secara baku sebesar dengan capaian 226,26 %
2. Sasaran Strategis Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan Indikator Kinerja Sasaran Predikat Sakip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok dengan capaian sebesar 100 %
3. Sasaran Strategis Meningkatkan akses terhadap layanan perpustakaan dengan :
 - a. Indikator Sasaran Prosentase (%) Minat Baca Masyarakat dengan capaian 132,74 %
 - b. Indikator Kinerja Sasaran Jumlah Pemustaka/ Pengunjung yang datang ke Perpustakaan Umum Kota Depok dengan capaian 78,13 %
 - c. Indikator Kinerja Sasaran Jumlah Koleksi Bahan Pustaka (dalam Eksemplar) dengan capaian 128,96 %
 - d. Indikator Kinerja Sasaran Persentase Perpustakaan di Kota Depok Yang Dibina dengan capaian 33,34 %

Terkait Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis yang diemban oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, rincian program dan kegiatan dari masing – masing Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis tersebut, seperti berikut ini.

Misi 1 : Mewujudkan pelayanan publik yang professional dan transparan

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Manajemen Dalam Pelayanan

Sasaran strategis ini didukung oleh program dan kegiatan seperti berikut ini:

1. Program Peningkatan Administasi Perkantoran

Kegiatan – Kegiatannya adalah :

- 1) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 3) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 4) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 5) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 6) Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan – Kegiatannya adalah :

- 1) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
- 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
- 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan – Kegiatannya adalah :

- 1) -

4. Program Pembangunan dan Pengembangan Tehnologi Informatika

Kegiatan – Kegiatannya adalah :

- 1) Pemeliharaan Sistem Kearsipan

5. Program Peningkatan Pengelolaan Kearsipan

Kegiatan – Kegiatannya adalah :

- 1) Penetapan Pengelolaan Arsip Secara Baku
- 2) Penambahan Khazanah Arsip Audiovisual Kota Depok
- 3) Pengawasan Internal Kearsipan se Kota Depok

- 4) Pengelolaan Pemasarakatan Kearsipan
- 5) Layanan Jasa Kearsipan
6. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Kegiatan :

- 1) Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 2) Penyusunan Raperda Kearsipan

Sasaran 2 : Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Sasaran strategis ini didukung oleh program dan kegiatan seperti berikut ini:

1. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan-kegiatannya :

- 1) Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja

Misi 2 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang kreatif dan berdaya saing

Tujuan 1 : Meningkatkan Minat Baca / Gemar Membaca di Masyarakat

Sasaran 1 : Meningkatnya akses terhadap layanan perpustakaan termasuk perpustakaan keliling

Sasaran strategis ini didukung oleh program dan kegiatan seperti berikut ini:

Program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis ini, antara lain sebagai berikut :

1. Program Minat Baca Masyarakat

Kegiatan – kegiatannya adalah:

- 1) Penyediaan Koleksi Bahan Perpustakaan
- 2) Pengolahan Koleksi Perpustakaan
- 3) Preservasi dan Konservasi Bahan Pustaka
- 4) Pembinaan Perpustakaan dengan E-Library
- 5) Pelayanan Perpustakaan Keliling
- 6) Pemasarakatan Gemar Membaca
- 7) Pembinaan Taman Bacaan Masyarakat
- 8) Survey Minat Baca Masyarakat

3.2. Realisasi Anggaran

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2020, alokasi anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok sebesar Rp. 12.701.565.744,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 7.350.46.344,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 5.351.419.400,00 yang tersebar di 8 Program dan 37 Kegiatan. Sejalan dengan perkembangan kebutuhan instansi dan tuntutan masyarakat, dengan tetap mengacu kepada Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok dan RPJMD Kota Depok Tahun 2016 – 2021, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2020, alokasi anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok mengalami penurunan menjadi Rp. 10.534.389.344,00,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 7.042.655.344,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.491.734.000,00 sehingga terdapat penurunan pada Perubahan APBD Tahun 2020 sebesar Rp. 2.167.176.400,00 atau 17,06 %.

Hal tersebut dikarenakan ada penyusuaian anggaran/ refocusing akibat pandemi covid-19.

Realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 9.547.318.650,00 atau 90,63 % sebagai berikut:

- a) Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.129.236.369,00 atau 87,03 %;
- b) Belanja Langsung sebesar Rp. 3.418.082.281,00 atau 97,89 %.

Tabel 10 ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PADA PERUBAHAN APBD TAHUN 2020

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA DEPOK

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	APBD 2019 (Rp)	PERUBAHAN APBD 2020 (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	ALASAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	5	6	7
	URUSAN KEARSIPAN			3.228.366.700	2.065.500.100	-1.162.866.600	
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA DEPOK						
1.02.18.1.02.18.001.	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100%	619.535.000	413.538.000	-205.997.000	
1.02.18.1.02.18.001.03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang tersedia	58 jenis	84.996.000	84.996.000	0	
1.02.18.1.02.18.001.04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak yang tersedia	16 jenis	55.000.000	55.000.000	0	
1.02.18.1.02.18.001.05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang tersedia	17 jenis	44.995.000	44.995.000	0	
1.02.18.1.02.18.001.06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat RT yang tersedia	44 jenis	74.000.000	74.000.000	0	
1.02.18.1.02.18.001.07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Mamin yang tersedia	5 jenis	90.000.000	40.375.000	-49.625.000	
1.02.18.1.02.18.001.08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalan dinas yang tersia	104 OH Dalam Daerah, 129 OH Luar Daerah	270.544.000	114.172.000	-156.372.000	
1.02.18.1.02.18.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	345.932.000	102.931.000	-243.001.000	
1.02.18.1.02.18.002.01.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan	2 gedung	50.000.000	25.000.000	-25.000.000	
1.02.18.1.02.18.002.02.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah pemeliharaan	5 kendaraan roda 4, 3kendaraan roda 2	95.000.000	47.500.000	-47.500.000	
1.02.18.1.02.18.002.03.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan	4 jenis	60.988.000	30.431.000	-30.557.000	
1.02.18.1.02.18.002.07.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	0	139.944.000	0	-139.944.000	
1.02.18.1.02.18.005.	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR	Prosentase Pegawai Yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi	100%	215.500.000	14.930.000	-200.570.000	

	Bimtek manajemen kearsipan dan perpustakaan bagi aparatur Diskarpus	Jumlah orang	0	85.000.000	0	-85.000.000	
1.02.18.1.02.18.005.03.	Bimbingan Teknis Kearsipan bagi OPD	Jumlah Orang	0	90.000.000	14.930.000	-75.070.000	
1.02.18.1.02.18.005.04.	Workshop Kearsipan	Jumlah orang	0	40.500.000,00	0	-40.500.000	
82.950.000	PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai Sakip	B	11.999.800	11.999.800	-	
1.02.18.1.02.18.006.01.	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	11.999.800	11.999.800	-	
1.02.18.1.02.18.022.	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN TEHNOLOGI INFORMATIKA	Cakupan Layanan e-Government Yang Terintegrasi	100%	72.000.000	72.000.000	-	
1.02.18.1.02.18.022.02.	Pemeliharaan Sistem Kearsipan	Jumlah Sistem	1 Sistem	72.000.000	72.000.000	-	
1.02.18.1.02.18.028.	PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN	Cakupan Integrasi Perencanaan	100%	234.309.900	234.309.900	-	
1.02.18.1.02.18.028.01.	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen Renja	43.999.900	43.999.900	-	
	Penyusunan Raperda Kearsipan	Jumlah Dokumen	1 Dok perda	190.310.000	190.310.000		
1.02.18.1.02.18.035.	PENINGKATAN PENGELOLAAN KEARSIPAN	Presentase Pengelolaan dan Layanan Lembaga Kearsipan Daerah	21,40%	1.729.090.000	1.215.791.400	-513.298.600	
1.02.18.1.02.18.035.01.	Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku	Jumlah yang dibina	22 kelurahan	909.185.000	842.808.800	-66.376.200	
1.02.18.1.02.18.035.03.	Penelusuran Arsip Bersejarah	Jumlah objek	0	58.850.000	1.386.000	-57.464.000	
1.02.18.1.02.18.035.06.	Pengembangan Pedoman Kearsipan	Jumlah Pedoman	0	60.000.000	0	-60.000.000	
1.02.18.1.02.18.035.11.	Sosialisasi Kearsipan	Jumlah Orang	50 orang	129.400.000	45.122.000	-84.278.000	
1.02.18.1.02.18.035.13.	Pengawasan Internal Kearsipan se Kota Depok	Jumlah PD	50 Perangkat Daerah	89.000.000	89.000.000	0	
1.02.18.1.02.18.035.15.	Penyediaan Diorama/ Wall of Fame	Jumlah kegiatan	0	128.770.000	0	-128.770.000	
1.02.18.1.02.18.035.04.	Penambahan Khasanah Arsip Audivisual	Jumlah lomba	1 lomba	100.000.000	100.000.000	0	
1.02.18.1.02.18.035.08.	Akuisisi Arsip Statis	Jumlah berkas	0	66.560.000	0	-66.560.000	
1.02.18.1.02.18.035.17.	Pengelolaan Pemasarakatan Arsip	jumlah lokasi	35 lokasi	134.325.000	88.300.000	-46.025.000	

1.02.18.1.02.18.035.20.	Layanan Jasa Kearsipan	Jumlah orang	110 orang	53.000.000	49.174.600	-3.825.400	
	URUSAN PERPUSTAKAAN			2.123.052.700	1.426.233.900	-696.818.800	
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA DEPOK						
1.02.17.1.02.18.042.	Pningkatan Minat Baca Masyarakat	Prosentase Minat Baca Masyarakat	50%	2.123.052.700	1.426.233.900	-696.818.800	
1.02.17.1.02.18.042.01.	Penyediaan Koleksi Buku Bacaan Perpustakaan	Jumlah buku	3.000 eksp, 1 paket e-book, 50 dvd	621.949.000	377.509.000	-244.440.000	
1.02.17.1.02.18.042.02.	Pengolahan Koleksi Bahan Perpustakaan	Jumlah bahan perpustakaan	5.000 eks	538.748.900	532.454.900	-6.294.000	
1.02.17.1.02.18.042.05.	Pembinaan Perpustakaan dengan E-Library	Jumlah perpustakaan yang dibina	5 perpustakaan	40.080.000	40.584.600	504.600	
1.02.17.1.02.18.042.06.	Bimbingan Teknis Perpustakaan Bagi Pengelola Perpustakaan Sekolah	Jumlah orang yang dibimtek	0	129.999.800	0	-129.999.800	
1.02.17.1.02.18.042.03.	Preservasi dan Konservasi Bahan Pustaka	Jumlah buku	1.000 eksp	22.500.000	22.500.000	0	
1.02.17.1.02.18.042.07.	Pelayanan Perpustakaan Keliling	Jumlah pelayanan	350 titik	299.425.000	288.610.600	-10.814.400	
1.02.17.1.02.18.042.08.	Pemasyarakatan Gemar Membaca	Jumlah pemasyarakatan	0	275.350.000	34.574.900	-240.775.100	
1.02.17.1.02.18.042.09.	Pembinaan Taman Bacaan Masyarakat	Jumlah TBM	4 TBM	100.000.000	49.999.900	-50.000.100	
1.02.17.1.02.18.042.10.	Penataan Perpustakaan Kelurahan	Jumlah perpustakaan yang ditata	0	15.000.000	0	-15.000.000	
1.02.17.1.02.18.042.11.	Survey Minat Baca Masyarakat	jumlah dokumen	1 dokumen	80.000.000	80.000.000	0	
	JUMLAH			5.351.419.400	3.491.734.000	-1.859.685.400	

**Tabel 11 CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM/ KEGIATAN TA. 2020
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA DEPOK**

PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	REALISASI PAGU (Rp)	PROSENT ASE (%)
I	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100%	413.538.000	410.457.773	99,26
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang tersedia	58 jenis	84.996.000	83.736.700	98,52
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak yang tersedia	16 jenis	55.000.000	54.916.050	99,85
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang tersedia	17 jenis	44.995.000	44.840.000	99,66
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat RT yang tersedia	44 jenis	74.000.000	73.153.500	98,86
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Mamin yang tersedia	5 jenis	40.375.000	40.168.500	99,49
6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas yang tersia	104 OH Dalam Daerah, 129 OH Luar Daerah	114.172.000	113.643.023	99,54
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	102.931.000	101.283.595	98,40
7	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan	2 gedung	25.000.000	24.480.000	97,92
8	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah pemeliharaan	5 kendaraan roda 4, 3 kendaraan roda 2	47.500.000	46.508.595	97,91
9	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan	4 jenis	30.431.000	30.295.000	99,55
10	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	0	-	-	-
III	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR	Prosentase Pegawai Yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi	100%	14.930.000	14.930.000	100,00
11	Bimtek manajemen kearsipan dan perpustakaan bagi aparatur diskarpus	Jumlah Orang	0	-	-	-

12	Bimbingan Teknis Kearsipan bagi OPD	Jumlah Orang	0	14.930.000	14.930.000	100,00
13	Workshop Kearsipan	Jumlah orang	0	-	-	-
IV	PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai Sakip	B	11.999.800	11.960.800	99,67
14	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	11.999.800	11.960.800	99,67
V	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMATIKA	Cakupan Layanan e-Government Yang Terintegrasi	100%	72.000.000	71.612.500	99,46
15	Pemeliharaan Sistem Kearsipan	Jumlah Sistem	1 Sistem	72.000.000	71.612.500	99,46
VI	PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN	Cakupan Integrasi Perencanaan	100%	234.309.900	206.070.400	87,95
16	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen Renja	43.999.900	41.007.400	93,20
17	Penyusunan Raperda Kearsipan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	190.310.000	165.063.000	86,73
VII	PENINGKATAN PENGELOLAAN KEARSIPAN	Presentase Pengelolaan dan Layanan Lembaga Kearsipan Daerah	21,40%	1.230.368.000	1.195.666.747	98,34
18	Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku	Jumlah yang dibina	22 kelurahan	840.785.000	831.510.653	98,66
19	Penelusuran Arsip Bersejarah	Jumlah objek	2 objek	1.386.000	1.386.000	100,00
20	Penambahan Khasanah Arsip Audivisual	Jumlah lomba	1 lomba	100.000.000	94.900.000	94,90
21	Pengembangan Pedoman Kearsipan	Jumlah Pedoman	0		-	-
22	Akuisisi Arsip Statis	Jumlah berkas	0			
23	Sosialisasi Kearsipan	Jumlah Orang	50 orang	45.122.000	45.122.000	100
24	Pengawasan Internal Kearsipan se Kota Depok	Jumlah PD	50 titik	89.000.000	85.837.000	96,45
25	Penyediaan Diorama/ Wall of Fame	Jumlah kegiatan	0	-	-	-
26	Pengelolaan Pemasarakatan Arsip	jumlah lokasi	35 lokasi	88.300.000	88.300.000	100
27	Layanan Jasa Kearsipan	Jumlah orang	110 orang			98,85

				53.000.000	48.611.094	
VIII	Peningkatan Minat Baca Masyarakat	Prosentase Minat Baca Masyarakat	50%	1.426.233.900	1.406.000.521	98,58
28	Penyediaan Koleksi Buku Bacaan Perpustakaan	Jumlah buku	3.000 eksp, 1 paket e-book, 50 dvd	377.509.000	367.560.221	97,36
29	Pengolahan Koleksi Bahan Perpustakaan	Jumlah bahan perpustakaan	5.000 eks	532.454.900	527.285.845	99,03
30	Preservasi dan Konservasi Bahan Pustaka	Jumlah buku	1.000 eksp	22.500.000	22.500.000	100
31	Pembinaan Perpustakaan dengan E-Library	Jumlah perpustakaan yang dibina	5 perpustakaan	40.584.600	39.990.000	98,53
32	Bimbingan Teknis Perpustakaan Bagi Pengelola Perpustakaan Sekolah	Jumlah orang yang dibimtek	0	-	-	-
33	Pelayanan Perpustakaan Keliling	Jumlah pelayanan	350 titik	288.610.600	285.438.655	98,90
34	Pemasyarakatan Gemar Membaca	Jumlah pemasyarakatan	0	34.574.900	34.575.000	100,00
35	Pembinaan Taman Bacaan Masyarakat	Jumlah TB	4 Taman Bacaan	49.999.900	49.779.900	99,56
36	Penataan Perpustakaan Kelurahan	Jumlah perpustakaan yang ditata	0	-	-	-
37	Survey Minat Baca Masyarakat	jumlah dokumen	1 Dokumen	80.000.000	78.871.000	98,59
				3.491.734.000	3.417.982.336	97,89

Tabel 12 ANGGARAN PERUBAHAN APBD TA. 2020 TARGET DAN REALISASI

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	PROSENTASE
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.4042.655.344	6.129.236.369	87,03
2	BELANJA LANGSUNG	3.491.734.000	3.417.982.336	97.89
JUMLAH		10.534.389.344	9.547.318.650	90,63

BAB IV PENUTUP

4.1 KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN KINERJA

Pada tahun 2020, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Visi dan Misi yang diembannya. Seluruh program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok, yang juga merupakan Visi Kota Depok, yaitu mewujudkan **Kota Depok yang Unggul, Nyaman, dan Religius**. Selain itu, dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok membawa dua buah misi, yang juga merupakan Misi Kota Depok, yaitu **Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan dan Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang religius, kreatif, dan berdaya saing**. Hal ini juga sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2016 – 2021.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok. Secara keseluruhan dari tiga (3) sasaran dan tujuh (7) indikator kinerja, capaiannya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Sasaran strategis Meningkatkan Kinerja Layanan Perangkat Daerah ::
 - a. Indikator Kinerja Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pengguna layanan dengan capaian sebesar 100%
 - b. Indikator Kinerja Sasaran Prosentase (%) jumlah lembaga pemerintahan yang telah mengelola arsipnya secara baku sebesar dengan capaian 226,26 %
2. Sasaran Strategis Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan Indikator Kinerja Sasaran Predikat Sakip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok dengan capaian sebesar 100 %
3. Sasaran Strategis Meningkatnya akses terhadap layanan perpustakaan dengan :
 - a. Indikator Sasaran Prosentase (%) Minat Baca Masyarakat dengan capaian 132,74 %
 - a. Indikator Kinerja Sasaran Jumlah Pemustaka/ Pengunjung yang datang ke Perpustakaan Umum Kota Depok dengan capaian 78,13 %
 - b. Indikator Kinerja Sasaran Jumlah Koleksi Bahan Pustaka (dalam Eksemplar) dengan capaian 128,96 %

- c. Indikator Kinerja Sasaran Jumlah Perpustakaan di Kota Depok Yang Dibina dengan capaian 33,34 %

Secara umum kegiatan – kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun 2020 didukung dengan 37 kegiatan yang tersebar dalam 8 program berhasil dilaksanakan dengan hasil baik . Namun dalam pelaksanaan hanya 7 program dan 26 kegiatan.

Namun ada 1 program yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya pembatasan berskala besar sebagai akibat pademi covid-19. Dan kegiatan yang mendukung program tersebut mengalami refocusing anggaran.

1. ***Dan adanya pedemik Covid - 19 dan peraturan PSBB berpengaruh juga dalam pelaksanaan kegiatan; (Surat Keputusan Walikota Nomor : 360/ 137/ Kpts/ DPKP/ Huk/ 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease (Covid-19) di Kota Depok)***
2. ***Refocusing terhadap pagu anggaran berakibat terdapat kinerja tidak tercapai sesuai target; (Surat Edaran Walikota Depok Nomor : 900/ 174-BKD tentang Penjadwalan Ulang Capaian Program dan Kegiatan)***

4.2 TANTANGAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN KINERJA

Berkaitan dengan hasil evaluasi dan analisis atas capaian sasaran strategis berdasarkan indikator sasaran pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun 2020, maka dapat disimpulkan bahwa tantangan terbesar pencapaian kinerja pada tahun mendatang dapat dibagi berdasarkan Bidang/Urusan. Untuk Bidang/Urusan Kearsipan, terdapat pada Program Peningkatan Pengelolaan Arsip untuk penerapan pengelolaan arsip secara baku di OPD – OPD Pemerintah Kota Depok melalui Kegiatan Penerapan Pengelolaan Arsip secara baku, peningkatan pengetahuan dan keterampilan ASN instansi – instansi Pemerintah Kota Depok melalui Kegiatan Workshop Kearsipan dan Kegiatan Bimbingan Teknis Kearsipan bagi OPD, penyediaan Sistem Informasi Kearsipan yang komprehensif dan terpadu melalui Kegiatan Pengembangan Sistem TI Kearsipan, dan dimulainya akuisisi arsip – arsip OPD – OPD Kota Depok melalui Kegiatan Akuisisi Arsip Statis (mulai TA 2018). Untuk Bidang/Urusan Perpustakaan, terdapat pada peningkatan koleksi buku – buku Perpustakaan (masih di bawah minimal Standar Nasional Perpustakaan : 2011, untuk Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten/Kota seperti Kota Depok minimal 50.000 judul buku) pada Kegiatan Penyediaan Koleksi Buku Perpustakaan

dan peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan dalam rangka peningkatan gemar membaca (masih di bawah minimal Standar Nasional Perpustakaan, untuk Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten/Kota seperti Kota Depok minimal 1.100.000 orang/tahun dengan keanggotaan perpustakaan minimal 200.000 orang).

Secara umum, kendala yang dihadapi pada tahun 2020, dalam upaya pencapaian sasaran strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok, antara lain:

1. Terbatasnya SDM kearsipan dan SDM perpustakaan;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana kearsipan dan perpustakaan;
3. Pembinaan kearsipan belum secara keseluruhan menyentuh semua instansi yang ada di Kota Depok;
4. Kurangnya tenaga pengelolaan kearsipan dan sarana – prasarana kearsipan di instansi – instansi Kota Depok sehingga menghambat pendampingan penataan pengelolaan kearsipan di instansi – instansi Kota Depok;
5. Minimnya armada mobil kearsipan dalam rangka sosialisasi kearsipan di masyarakat;
6. Minimnya koleksi buku perpustakaan;
7. Minimnya armada mobil perpustakaan keliling.

4.3 STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Terkait dengan tantangan dan kendala seperti yang telah di uraikan sebelumnya, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok berupaya untuk melakukan perbaikan di masa mendatang baik dalam Urusan/Bidang Kearsipan maupun dalam Urusan/Bidang Perpustakaan. Beberapa strategi yang diambil dapat dikemukakan seperti di bawah ini:

1. Penambahan jumlah SDM Kearsipan (Arsiparis Terampil dan Ahli);
2. Penambahan jumlah SDM Perpustakaan (Pustakawan Terampil dan Ahli);
3. Mengadakan tenaga arsiparis di setiap instansi Pemerintah Kota Depok;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana Kearsipan dan Perpustakaan;
5. Mengembangkan Sistem Kearsipan SIKD/JIKD yang didapat dari ANRI agar sesuai dengan kebutuhan pengelolaan arsip di Kota Depok;
6. Meningkatkan pembinaan ASN di instansi – instansi Pemerintah Kota Depok dalam rangka peningkatan pengelolaan arsip secara baku di Kota Depok;
7. Peningkatan jumlah/target OPD dalam pendampingan penataan kearsipan;

8. Menyediakan Kegiatan Layanan Jasa Kearsipan termasuk pendanaannya (alokasi APBD) mengingat mulai tumbuhnya kesadaran OPD – OPD dalam menata dan mengelola arsip – arsipnya;
9. Menerima sumbangan buku dari masyarakat dan mengajukan permohonan bantuan keuangan maupun hibah buku ke Propinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta;
10. Mengajukan permohonan bantuan/hibah buku dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas) maupun kementerian – kementerian dan badan – badan di pemerintahan pusat seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi), Kementerian Pariwisata, dan lain – lain;
11. Mengadakan kerja sama – kerja sama dengan para penerbit dan para distributor buku dengan pemberian fasilitas – fasilitas tertentu di dalam lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan seperti pemasangan iklan, pembuatan pojok usaha, dan lain – lain;
12. Pengelolaan tenaga – tenaga honorer di Bidang/Urusan Kearsipan dan di Bidang/Urusan Perpustakaan secara efektif dan efisien sehingga membantu dinas dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
13. Menganggarkan pengadaan mobil perpustakaan perpustakaan keliling dan mobil sosialisasi kearsipan baik dengan alokasi APBD Kota Depok maupun bantuan/hibah Propinsi Jawa Barat dan Propinsi DKI Jakarta;
14. Penyusunan peraturan perundang – undangan daerah dan pedoman – pedoman dalam Urusan/Bidang Kearsipan dan Urusan/Bidang Perpustakaan agar dapat meningkatkan pelayanan kedua bidang tersebut kepada masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah melalui layanan jasa kearsipan.

Selain itu akan dilakukan perbaikan dalam proses perencanaan, evaluasi, dan pengendalian program dan kegiatan sehingga dapat tersusun dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang lebih baik pada tahun mendatang.

INDIKATOR	SATUAN	TARGET TH. 2020	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	REALISASI 2019
Prosentase (%) Minat Baca Masyarakat	%	50	66,37		64,88
Jumlah Pemustaka/ Pengunjung yang datang ke Perpustakaan Umum Kota Depok	orang	35.000			80.960
Jumlah Koleksi Bahan Pustaka (dalam Eksemplar)	eksp	37.000			44.887 eksp 18.978 judul
Persentase Jumlah Perpustakaan di Kota Depok Yang Dibina	TBM	11%			10 TBM
Pusling	Titik	350			
Keanggotaan Perpustakaan	Orang	2500			Capaian 3.056 Total s/d 2019 9.247